

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa ketegangan narasi klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia berakar dari kedekatan identitas budaya kedua negara, dan batik merupakan salah satu simbol budaya yang paling konsisten menjadi titik ketegangan tersebut sejak sebelum pengakuan UNESCO 2009 hingga kasus Aisha Retno pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan tersebut tidak selesai secara struktural pasca pengakuan UNESCO, melainkan terus bertransformasi mengikuti perkembangan ruang publik, termasuk ke ranah digital. Dalam konteks inilah batik ditemukan tidak hanya berfungsi sebagai objek identitas budaya, melainkan juga sebagai medium yang digunakan Indonesia untuk merespons dan meredam ketegangan tersebut melalui diplomasi budaya.

Peneliti juga menemukan bahwa keterlibatan aktor negara dan non negara sama-sama mempengaruhi implementasi diplomasi budaya melalui batik. Pada tingkat aktor negara, Kemenbud RI dan KBRI Kuala Lumpur berperan mempromosikan batik melalui forum internasional, festival, dan pameran budaya. Pada aktor non-negara, akademisi, komunitas seni budaya, dan masyarakat turut berperan, salah satunya melalui collaborative workshop yang menjadi ruang belajar bersama mengenai sejarah, filosofi, dan teknik batik di Indonesia dan Malaysia (Wahida & Himawan, 2022).

Melalui kerangka soft power dan diplomasi budaya, yang dibantu oleh *heritage as diplomacy* Todorovic (2022), dan parameter operasional Goff (2020)

yang meliputi aktor, tujuan, cakupan budaya, dan model relasi. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi diplomasi budaya batik saat ini masih didominasi oleh aktor negara dengan model relasi "*club*", dengan kesenjangan pada cakupan media digital yang belum sepenuhnya merespons dinamika sentimen negatif di ruang publik daring. Dengan demikian, batik tidak dapat dipahami semata sebagai sumber konflik identitas budaya, melainkan sebagai medium rekonsiliasi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi budaya yang non-koersif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang dapat diberikan. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi budaya melalui batik, baik lewat kebijakan maupun program kerja lintas negara yang melibatkan masyarakat Indonesia dan Malaysia, mengingat kedekatan sejarah kedua negara sebagai bangsa serumpun. Masyarakat pengguna media sosial juga perlu meningkatkan literasi budaya mengenai sejarah dan filosofi batik di kedua negara, agar media sosial tidak hanya menjadi ruang perdebatan, tetapi juga ruang edukasi. Aktor negara seperti Kemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur disarankan memperluas model relasi dari pola "*club*" menuju "*network*" dengan melibatkan lebih banyak aktor non-negara serta memperkuat kehadiran di ruang media digital, mengingat sentimen negatif justru paling banyak muncul di ruang tersebut.